

Revitalisasi Kawasan Kota Tua Diperkirakan Rampung Agustus Ini

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuka kawasan wisata Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, proyek revitalisasi Kota Tua direncanakan rampung pada Agustus ini.

“Insya Allah di bulan Agustus ini kita selesaikan ya. Ada kejadian longsor sedikit tapi insya Allah bisa diatasi, dalam beberapa hari ke depan,” kata Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/8).

Awalnya revitalisasi Kota Tua di Taman Sari, Jakarta Barat, ditargetkan selesai pada akhir Juli. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengakui, revitalisasi kawasan Kota Tua tak sesuai target pengerjaan.

“Jadi memang target kami itu di akhir Juli semuanya sudah 100 persen. Tinggal 3 persennya itu finishing,” ujar Hari, Minggu (7/8).

Hari menyebutkan, ada kejadian tak terduga yang menyebabkan progres pengerjaan revitalisasi Kota Tua terhambat. “Ada semacam longsor tanah. Sebelumnya pakai

fondasi dangkal. Makanya sekarang dibuat menjadi fondasi dalam,” ujar dia.

Perbaikan fondasi ini, kata Hari, membuat proyek revitalisasi kawasan Kota Tua molor dari target. Selain itu, keterlambatan juga terjadi karena adanya perubahan desain bangunan dari konsultan perencanaan. “Jadi, bukan keterlambatan dari kontraktor ataupun dari kami, tetapi memang rencana ada sedikit perubahan yang memang membuat agak sedikit lama. Nah, ini jadi hambatan,” ujar dia. Dalam proses pengerjaan revitalisasi ini, Hari juga mengatakan pihaknya tak bisa terburu-buru dalam menggarapnya. Pasalnya, ada pembuatan saluran air yang dilakukan PAM Jaya di area bekas halte Stasiun Kota yang akan digunakan PT KAI.

“Otomatis kita harus bikin aliran. Kalau kita langsung hajar di situ, bisa-bisa PT KAI enggak dapat suplai air bersih,” tutur dia.

“Memindahkan utilitas dari sana itu butuh waktu, sampai dengan terlayannya air bersih PAM itu ke PT KAI. Termasuk kendala yang di area halte juga,” ucap Hari. ● **yan**

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PERAWATAN PATUNG ASTA BRATA

Pekerja membersihkan patung Asta Brata (Arjuna Wijaya) di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (9/8). Perawatan dan pembersihan itu dilakukan untuk menjaga kondisi patung yang dibuat oleh seniman Bali Nyoman Nuarta pada tahun 1987.

28 RT ZONA MERAH COVID

Wagub DKI Imbau Masyarakat Terus Terapkan Prokes

Angka covid ini masih ada peningkatan, sekalipun memang angka kematian tidak meningkat, namun kita tetap waspada dan jangan dianggap enteng jangan dianggap remeh, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengimbau masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Hal itu dilakukan untuk menekan penularan Covid-19 yang saat ini masih terus mengalami lonjakan.

“Berbagai upaya telah dibuat juga oleh pemerintah pusat dan juga Satgas DKI, seperti wajib masker di daerah-daerah, kemudian vaksin, PeduliLindungi, dan juga yang tidak kalah penting adalah program vaksin,” ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/8).

“Jadi harus disiplin,

patuh, dan bertanggung jawab melaksanakan protokol kesehatan,” lanjut dia. Riza juga menegaskan pihaknya akan terus mengencakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster agar bisa cepat mencapai 100 persen. Oleh karena itu, ia mengajak semua warga bisa membawa keluarganya yang belum melakukan vaksinasi Covid-19 terutama anak-anak dan warga lanjut usia (lansia). “Jadi angka covid ini masih ada peningkatan, sekalipun memang angka kematian tidak meningkat, namun kita tetap waspada dan jangan diang-

gap enteng jangan dianggap remeh,” ujar dia.

Adapun tingkat persentase kasus positif atau positivity rate Covid-19 di DKI Jakarta dalam sepekan terakhir berada jauh di atas ambang batas aman yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, positivity rate sepekan terakhir mencapai angka 14,8 persen. Sementara itu, ambang batas aman positivity rate Covid-19 yang ditentukan oleh WHO adalah tidak lebih dari 5 persen.

28 RT ZONA MERAH

Jumlah RT zona merah penularan virus corona (Covid-19) di Jakarta juga kembali meningkat. Dari data terakhir, tercatat ada 28 zona merah yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

Melansir laman corona.jakarta.go.id, data RT zona

merah ini merupakan periode 1-7 Agustus 2022.

Data tersebut mencatat, Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah RT zona merah terbanyak. Di masing-masing daerah itu terdapat 10 RT berstatus zona merah.

Sementara itu, di Jakarta Pusat terdapat dua RT zona merah, Jakarta Timur dua RT zona merah, dan Jakarta Selatan empat RT zona merah.

Berikut Daftar 28 RT Zona Merah di Jakarta:

- Jakarta Pusat
 - Kel. Cempaka Putih Barat, RT 005, RW 007
 - Kel. Rawasari, RT 013, RW 009
- Jakarta Timur
 - Kel. Cipinang Besar Selatan, RT 003, RW 008
 - Kel. Setu, RT 007, RW 005
- Jakarta Barat
 - Kel. Cengkareng Timur, RT 007, RW 014
 - Kel. Cengkareng Timur, RT 008, RW 014
 - Kel. Duri Kosambi, RT 001, RW 005
 - Kel. Kembangan Selatan, RT 010, RW 001
 - Kel. Kembangan Utara, RT 013, RW 009
 - Kel. Kembangan Utara, RT 007, RW 009
- Jakarta Utara
 - Kel. Kamal Muara, RT 001, RW 006
 - Kel. Kamal Muara, RT 006, RW 006
 - Kel. Kamal Muara, RT 004, RW 003
 - Kel. Kamal Muara, RT 006, RW 005
 - Kel. Kapuk Muara, RT 011, RW 007
 - Kel. Kapuk Muara, RT 012, RW 007
 - Kel. Pademangan Timur, RT 009, RW 011
 - Kel. Penjaringan, RT 022, RW 008
 - Kel. Pluit, RT 020, RW 002
 - Kel. Sunter Agung, RT 015, RW 016. ● **yan**

Kemendagri Apresiasi Kinerja Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (kanan bawah) bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro (kiri bawah) saat audiensi di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Senin (8/8).

JAKARTA (IM) - Usai meninjau perbaikan jalan di Tegal Dinas, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, berangkat ke ibukota dalam rangka menghadiri audiensi bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, yang sekaligus menjabat sebagai Plh. Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri. Audiensi tersebut bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Senin (8/8).

Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati Bekasi memberikan laporan kepada Sekjen Kemendagri terkait berbagai tugas yang telah dilaksanakannya dalam 3 bulan pertama masa jabatannya, dan program-program yang akan dijalankannya dalam rangka mencapai Kabupaten Bekasi yang MAKIN BERANI.

“Saya langsung berangkat ke Kemendagri untuk memenuhi undangan audiensi dengan Pak Sekjen Kemendagri. Dalam pertemuan tersebut, saya melaporkan pelaksanaan tugas saya selama 3 bulan pertama menjabat sebagai Pj. Bupati Bekasi,” katanya dalam rilis

Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (9/8).

Selain itu, dirinya juga menyampaikan permohonan kepada Kemendagri agar dapat mempercepat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri terhadap berbagai peraturan dan Keputusan Bupati, khususnya dalam proses rotasi dan mutasi pegawai Pemkab Bekasi.

“Saya juga sampaikan permohonan kebijakan terkait percepatan izin-izin tertulis Mendagri terhadap berbagai peraturan dan Keputusan Bupati, khususnya mengenai rotasi dan mutasi Pejabat Struktural,” tambahnya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa Sekjen Kemendagri mengapresiasi dan mendukung semangat program-program yang dijalankan oleh Pemkab Bekasi, serta akan berusaha untuk mempercepat proses penerbitan izin tersebut.

“Pak Sekjen Kemendagri mengapresiasi dan memberikan dorongan semangat untuk program-program MAKIN BERANI. Terkait izin tadi, beliau juga berjanji akan mempercepat prosesnya,” tuturnya. ● **mdl**

DPRD DKI Bakal Panggil Dinkes, Minta Penjelasan Soal Rumah Sehat

JAKARTA (IM) - Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan perubahan jenama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan Rumah Sehat untuk Jakarta.

Sekretaris Komisi E, Johny Simanjuntak mengatakan sudah mengusulkan hal ini ke rekan-rekan anggota dewan lainnya.

“Saya usulkan di komisi E, sudah kita undang deh Dinkes, apa sih maksudnya. Ini kan jadi main-main, tidak substantif,” ujar Johny saat dihubungi, Selasa (9/8).

Johny mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjelaskan alasan di balik penjenamaan rumah sakit menjadi rumah sehat. Apalagi, menurut dia langkah tersebut tidak menyentuh substansi persoalan yang ada di Jakarta.

“Apa sih urgensinya menambahkan rumah sehat. Enggak ada, paling jadi pengeluaran pembiayaan,” ungkapnya.

Menurut Johny rencananya Dinkes bakal dipanggil pekan

depan. Ia mengatakan hal ini sekaligus untuk mempertanyakan soal keputusan itu diambil tanpa mengajak bicara anggota dewan.

“Dia tidak pernah ajak dewan (bahas) kebijakan tersebut, katakanlah dia sebagai eksekutor, seolah olah kebijakan seenaknya saja,” paparnya.

Politikus PDI Perjuangan itu pun menilai kebijakan mengubah jenama menjadi rumah sehat itu tak menyentuh masalah substansial. Padahal, kata dia, masih banyak masalah mengenai kesehatan yang tak disentuh oleh Pemprov DKI.

Salah satunya adalah masalah pelayanan di RSUD. Menurut dia Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan seharusnya lebih mementingkan perbaikan pelayanan daripada mengubah jenama.

“Sebenarnya kalau Pak Gubernur itu punya perhatian pokok terhadap persoalan rumah sakit, yang harus dipikirkan itu pelayanan,” ujar Johny.

“Pelayannya masih amburadul, khususnya di pusk-

esmas-puskesmas, RSUD,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah istilah atau jenama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.

Perubahan ini hanya berlaku bagi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anies mengatakan penjenamaan ini dilakukan karena selama ini ‘rumah sakit’ memiliki orientasi pada kuratif dan rehabilitatif.

Mengutip akun resmi Pemprov DKI di Instagram, @dkijakarta, terdapat sejumlah pengembangan dalam ‘Rumah Sehat untuk Jakarta’. Di antaranya; layanan ginjal dan jantung terpadu; layanan stroke terpadu.

Kemudian, layanan geriatri terpadu; layanan kesehatan ibu dan anak/tumbuh kembang anak; dan layanan klinik gangguan belajar. Dari informasi akun tersebut, tercatat ada 31 lokasi ‘Rumah Sehat untuk Jakarta’. Lokasi tersebut tersebar di seluruh wilayah Jakarta. ● **yan**

Wagub DKI Tegaskan Pemindahan Ibu Kota untuk Atasi Persoalan di Jakarta

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi terkait isu Jakarta tenggelam di 2050 akibat penggunaan air tanah yang meningkat setiap tahunnya. Ia menilai, pemindahan ibu kota menjadi salah satu upaya guna mengurangi dampak penggunaan air tanah.

“Salah satu tujuannya memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, di antaranya adalah mengurangi beban DKI Jakarta, Termasuk beban adanya penurunan muka air tanah,” kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/8).

Selain itu, Ariza, sapaan akrabnya, juga mengatakan melalui PAM Jaya terus melakukan percepatan bersama pemerintah pusat dan Kementerian PUPR terhadap penyediaan air bersih.

“Supaya tidak ada lagi ancaman penyedotan air tanah melalui pompa-pompa di rumah-rumah, kita upayakan air bersih itu didapatkan melalui PAM Jaya, dan beberapa upaya lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan penggunaan air

tanah di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Hal ini dapat memicu land sinking atau penurunan permukaan tanah. Dia mengatakan dalam waktu dekat, Jakarta akan tenggelam.

“Prediksinya di tahun 2050, 90 persen dari wilayah Jakarta terutama di bagian utara itu akan bisa juga kemudian tenggelam,” paparnya dalam Webinar kemarin, Senin (8/8).

Ia menjelaskan, dengan penggunaan air tanah yang masih tinggi ini bisa mengancam kehidupan di Jakarta dan menimbulkan banyak efek ekologi kedepannya.

“Penggunaan air yang kemudian tidak segera diselesaikan dan terus mengambil air dari tanah yang memang semakin sinking pastinya,” kata Arief.

Penggunaan air tanah juga termasuk penyediaan air minum, saat ini masih belum cakupannya memenuhi dari keinginan masyarakat. Target PAM Jaya, pada 2030 bisa segera membantu masyarakat dalam hal kebutuhan air. “Karena sekali lagi air menjadi kebutuhan dasar dari kehidupan manusia,” paparnya. ● **yan**



FOTO: ANT

PENJUALAN POHON PANJAT PINANG

Pekerja mengupas kulit batang pohon pinang di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa (9/8). Penjualan Pohon Pinang untuk perlombaan panjat pinang dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI tersebut mulai marak dijual dengan harga Rp750 ribu-Rp1,5 juta per buah.

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 11 Januari 2022, kami, PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS sebagaimana termaktub dalam akta Addendum REKSA DANA SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA 

Jakarta, 10 Agustus 2022

Manajer Investasi
REKSA DANA SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN

Bersama ini kami umumkan bahwa seluruh pemegang saham PT. Dwijaya Primasarana, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") akan mengalihkan sebagian besar saham Perseroan kepada pihak lain, yang akan menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan. Kepada pihak yang berkepentingan baik kreditur maupun karyawan Perseroan, dan pihak lainnya, apabila ada keberatan agar menyampaikan keberatannya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini ke:

Rukan Italan Walk Blok I No. 19, Jl. Raya Boulevard Barat, Kel. Kip Gading Bkt., Kec. Kip Gading, Jakut. Up. Tn. Moelyono.

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Horat kami,
Jakarta, 9-8-2022
[Moelyono]
[Megawaty]
[A.MR.Wahyu Abadi]
Direksi Perseroan

PT. SOLUSI TEKNIK INDUSTRI Berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")

PENGUMUMAN

Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham dalam Perseroan akan melakukan peningkatan modal dasar, modal disor dan ditempatkan serta pengalihan yang akan berdampak menjadi perubahan pengendalian saham dalam perseroan.

Untuk memenuhi kewajiban pengumuman sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberitahukan bahwa bagi Kreditor dan pihak lainnya yang memiliki keberatan atas Transaksi tersebut dapat menyampaikan keberatannya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengumuman ini.

10 Agustus 2022

Direksi
PT. SOLUSI TEKNIK INDUSTRI
Ruko Mega Kemayoran Blok C No.2 Lt.4,
Jl. Angkasa Kav B6, RT.013, RW.010,
Gn Sahari Selatan, Kemayoran
Jakarta Pusat - DKI Jakarta